



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA) 2021**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2021. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastruktur TIK, sumber daya manusia IT, Single Data System (SDS) Jawa Tengah, terwujudnya smart province Jawa Tengah sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia. Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023.

Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian menjadi sektor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam membangun Jawa Tengah. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 70).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik Tahun 2021.
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik Tahun 2021 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi

dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah mengacu sistematika sebagaimana pedoman dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu:

BAB I Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2019.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2019 dan Capaian Renstra Diskominfo Prov. Jateng.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Prov. Jateng.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Prov. Jateng.
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- 2.6. Prestasi yang dicapai pada Tahun 2019.

BAB III Tujuan dan Sasaran Diskominfo Prov. Jateng.

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Prov. Jateng.
- 3.3. Tantangan dan Peluang Diskominfo Prov. Jateng.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Prov. Jateng.

BAB V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI DISKOMINFO PROV. JATENG TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2019 dan Capaian Renstra Diskominfo Prov. Jateng.

Gambaran kinerja Diskominfo Tahun 2019 diperoleh dari evaluasi capaian kinerja dan *e-Controlling* hingga triwulan IV. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 hingga triwulan IV.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo Prov. Jateng 2019 dan
Pencapaian Renstra Diskominfo Prov. Jateng s/d Tahun 2018.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1.	<i>Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</i>	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	85 %	-	-	57 %	60 %	105	64 %	-	67
1.1	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarakan	240 Konten	-	-	24 Konten	24 Konten	100	50 Konten	-	10
1.2	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan	85 Kelompok	-	-	55 Kelompok	55 Kelompok	100	27 Kelompok	-	65

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan Pendapat Umum	220 Buah	-	-	44 Buah	44 buah	100	88 buah	-	20
2	<i>Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	80 %	-	-	20 %	20 %	100	40 %	-	25
2.1	Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data center	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik provinsi Jawa Tengah	86 Lokasi	-	-	41 Lokasi	41 Lokasi	100	41 Lokasi	-	48

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Kegiatan pengelolaan internet dan intranet	Jumlah kapasitas Banwidth yang tersedia	2.000 MBps	-	-	1.200 MBps	1.500 MBps	125	1.400 MBps	-	75
2.3	Kegiatan pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur	Jumlah SKPD yang terintegrasi infrastruktur TIK	41 OPD	-	-	14 OPD	14 OPD	100	21 OPD	-	34
3	<i>Program Pengembangan E-Government</i>	Persentase Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi	85 %	-	-	45%	45%	100	55%	-	53

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan /dikelola	15 Unit	-	-	9 Unit	9 Unit	100	10 Unit	-	60
3.2	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola E-Government	Jumlah regulasi aplikasi yang terbit	6 Buah	-	-	2 Buah	2 Buah	100	3 Buah	-	33
3.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government	Jumlah penyelenggara E-Government yang	1.100 Orang	-	-	650 Orang	680 Orang	105	800 Orang	-	62

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ditingkatkan kapasitasnya									
URUSAN STATISTIK											
1.	<i>Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi</i>	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	100%	-	-	74%	141%	191%	79%	-	191
		Persentase Badan Publik Yang Terbuka	100%	-	-	68%	68%	100	76%	-	68
1.1	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur	Jumlah Data sektor ekonomi dan infrastruktur yang tersedia dalam single data system	9.000 Jenis	-	-	6.500 Jenis	9.173 jenis	141	7.000 Jenis	-	102
1.2	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, politik, hukum dan HAM	Jumlah Data sektor sosial, politik, hukum dan HAM	10.000 jenis	-	-	7.500 jenis	9.958 jenis	133	8.000 jenis	-	99,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang tersedia dalam single data system									
1.3	Kegiatan peningkatan pelayanan data dan informasi publik	Jumlah daftar informasi publik (DIP) yang di publikasikan badan publik	80 kelompok	-	-	60 kelompok	60 kelompok	100	65 kelompok	-	75
1.4	Kegiatan peningkatan keterbukaan informasi public	Persentase penyelesaian sengketa informasi	85%	-	-	81%	81%	100	75%	-	95
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUSAN PERSANDIAN											
1	<i>Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah</i>	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Keamanan Informasi lebih dari 80%	83,33%	-	-	16,67%	16,67%	100	33,33%	-	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Kegiatan Tata Kelola Persandian	Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya	201 orang	-	-	201 orang	285 orang	142	119 orang	-	142
1.2	Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi	Jumlah aplikasi yang di assessment keamanan informasinya	247 Unit	-	-	50 unit	50 unit	100	100 unit	-	20
1.3	Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi intra Pemerintah	Jumlah informasi yang menggunakan jarring komunikasi sandi	39.317 buah	-	-	9.854 buah	21.406 buah	217	15.594 buah	-	54

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerint-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NON URUSAN											
1	<i>Program Managemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	-	-	100%	100%	100	100%	-	100
1.1	Kegiatan administrasi pelayanan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan PD	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
1.2	Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	Terlayannya jasa surat menyurat	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerint-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	Tersediannya jasa komunikasi, air dan listrik	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.4	Kegiatan jaminan barang milik daerah	Tersediannya jaminan terhadap barang-barang milik daerah	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.5	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	Teselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non PNS dan kebersihan kantor	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.6	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah	Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Kegiatan pelayanan penyediaan makan dan minum perangkat daerah	Tersediannya makan dan minum rapat yang memadai	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.8	Kegiatan penyediaan bahan bacaan/ buku perpustakaan perangkat daerah	Tersediannya bahan bacaan/ buku perpustakaan perangkat daerah	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.9	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan/ rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional perangkat daerah	Gedung dan kendaraan dinas yang representatif	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.10	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana kantor dan rumah	Sarana kantor dan rumah tangga	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tangga perangkat daerah	perangkat daerah yang memadai									
1.11	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor	Tersediannya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi. Alat studio, computer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.12	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang memadai	-	-	-	30 Orang	30 Orang	100	-	-	-
1.13	Kegiatan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran	Perlengkapan pendukung perkantoran yang memadai	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerint-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<i>Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang tercapai	100%	-	-	100%	100%	100	100%	-	100
2.1	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan diskominfo prov jateng yang tersusun	8 Dokumen	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	-	100
2.2	Kegiatan penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja diskominfo prov jateng yang tersusun	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	-	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Prov. Jateng.

Pada tahun 2019 capaian kinerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan target yang sudah terakomodir pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Prov. Jateng.

NO	Indikator Sasaran Renstra/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INDIKATOR SASARAN RENSTRA.										
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	-	-	2,69	2,82	3,12	3,41	2,94	3,41	
2.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE.	-	-	2,30	2,40	3,43	3,71	2,51	3,71	
3.	Indeks Domain Layanan SPBE.	-	-	2,93	3,06	3,67	4,06	3,20	4,06	
4.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	-	-	8,21%	15,18%	8,21%	60%	30,36%	63,72%	
5.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	-	-	1	1	1	2,9	1	2	
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018).										
Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.										
1.	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	-	-	15%	20%	15%	20%	40%	60%	
Program Pengembangan E-Government.										
2.	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	-	-	33%	45%	33%	45%	55%	65%	
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.										
3.	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	-	-	-	57%	-	60%	64%	71%	

NO	Indikator Sasaran Renstra/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pengembangan Data Statistik SektoraldanKeterbukaanInformasi.										
4.	Persentase ketesediaan data sektoral.	-	-	64%	74%	64%	141,11 %	79%	89%	
5.	Persentase badanpublik yang terbuka.	-	-	55%	68%	55%	68%	76%	84%	
Program Peningkatan Persandian Daerahdankemananinformasidaerah.										
6.	Persentase Perangkat Daerah memilikikeaman aninformasi>80.	-	-	-	16,67%	-	16,67%	33,33 %	50,00 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Prov. Jateng.

2.3.1. Koordinasi dan Sinergi Tingkat Kinerja Pelayanan Diskominfo.

Salah satu Program Unggulan Pemprov Jateng untuk mencapai visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap mboten korupsi dan ngapusi dan misi Mempercepat Reformasi Birokrasi Yang Dinamis, serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab./Kota adalah program unggulan ke-3 Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, Sehingga Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan mengedepankan layanan yang terintegrasi sehingga dapat tercapai efisiensi dalam kelembagaan, dan system manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Untuk menjalankan program unggulan dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun kebijakan strategis yang sesuai dengan implementasi misi kedua yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut antara lain dengan “ meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik serta dengan memperkuat keamanan informasi

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan gambaran tugas pokok dan fungsi pelayanan Diskominfo Prov. Jateng, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Perlunya peningkatan optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi publik;
3. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai;
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah;
5. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
6. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
7. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral;
8. Perlunya peningkatan keamanan informasi sesuai sertifikasi standar internasional;
9. Perlunya peralatan pendukung utama dan wajib persandian sesuai rekomendasi standar keamanan informasi;
10. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo Prov. Jateng dalam mendukung kinerja program pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/seksi/subbagian;
3. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dan Terhadap Capaian Nasional/Internasional.

Perumusan indikator pembangunan yang menjadi tanggungjawab Diskominfo Provinsi Jawa Tengah pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian Nasional/Internasional. Hal tersebut diantaranya disebabkan belum adanya fokus, sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota serta belum menjadi prioritas pembangunan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna

mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan:

- a. Kesenjangan informasi di masyarakat Jawa Tengah;
- b. Pesatnya perkembangan TIK;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah;
- d. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat Jawa Tengah terhadap TIK;
- e. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System;
- f. Tuntutan keterbukaan data dan informasi;
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

2. Peluang:

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis teknologi informasi;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya data, informasi dan komunikasi;
- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berbasis elektronik
- e. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

2.3.5. Isu-Isu Penting

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Sulitnya dalam monitoring penggunaan jaringan SKPD, dikarenakan beberapa OPD masih menganggarkan sewa bandwidth untuk *backup* jaringan, sehingga berakibat pada kurang optimalnya penggunaan *bandwidth* yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika oleh OPD.
2. Belum terbangunnya single data dan big data centre yang terintegrasi, sehingga kebutuhan data untuk melengkapi layanan informasi dan komunikasi publik masih mengandalkan kontribusi dari OPD dan instansi terkait yang terkadang terlambat.

3. Kurangnya pembaruan regulasi mengenai proses bisnis pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
4. Belum adanya standarisasi data sektoral dan meta data baku untuk data statistik sektoral, menyebabkan validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral belum optimal;
5. Belum semua aplikasi pengolah data di SKPD terintegrasi dalam aplikasi Single Data System;
6. PPID Pembantu SKPD dan BUMD Pemprov Jateng serta PPID Utama Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah kesulitan mengumpulkan informasi publik yang ada di masing-masing Badan Publiknya;
7. Sarana pendukung keamanan informasi belum memadai (SDM Teknis Keamanan Informasi, peralatan dan regulasi);
8. Sistem keamanan informasi OPD Provinsi Jawa Tengah masih banyak yang tidak/kurang aman ;
9. Awareness dan dukungan keamanan informasi dari pimpinan hingga pelaksana yang masih kurang, sehingga sinergitas dan persamaan visi/persepsi pengelolaan dan penyelenggaraan keamanan informasi belum terbangun
10. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Program Kehumasan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Belum optimalnya penggunaan Sertifikat Elektronik/Digital;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD Tahun 2021. Tetapi masih ada pergeseran anggaran antar program dan kegiatan yang perlu dilakukan karena masih adanya ketidaksesuaian wewenang tupoksi pada bidang.

Tabel 2.3.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Prov. Jateng Tahun 2021.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
1.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.				18.763.991						30.362.180	
1.1	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan.	132 Konten	16.895.000	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan.	132 Konten	24.000.000		
1.2	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan.	68 Kelompok	1.247.165	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan.	68 Kelompok	1.362.180		
1.3	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik.	Jawa Tengah	Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum.	132 Buah	621.826	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik.	Jawa Tengah	Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum.	88 Buah	5.000.000		
2.	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.				18.866.000						36.226.032	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center.	Jawa Tengah	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah.	69 Lokasi	12.548.102	Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center.	Jawa Tengah	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah.	69 Lokasi	23.681.000		
2.2	Kegiatan Pengelolaan	Jawa Tengah	Jumlah kapasitas bandwidth yang tersedia.	1.600 MBps	5.992.866	Kegiatan Pengelolaan	Jawa Tengah	Jumlah kapasitas bandwidth yang tersedia.	1.600 MBps	12.220.000		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Internet dan Intranet.					Internet dan Intranet.					
2.3	Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur.	Jawa Tengah	Jumlah SKPD yang terintegrasi infrastruktur TIK (co-Location/ Hosting)	28 OPD	325.032	Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur.	Jawa Tengah	Jumlah SKPD yang terintegrasi infrastruktur TIK (co-Location/ Hosting)	28 OPD	325.032	
3.	Program Pengembangan eGovernment.				5.893.315					11.292.734	
3.1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.	Jawa Tengah	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola.	13 Unit	2.904.057	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.	Jawa Tengah	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola.	13 Unit	8.338.652	
3.2	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola eGovernment.	Jawa Tengah	Jumlah regulasi aplikasi yang terbit.	4 Dok	2.409.418	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola eGovernment.	Jawa Tengah	Jumlah regulasi aplikasi yang terbit.	4 Dok	2.249.959	
3.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment.	Jawa Tengah	Jumlah penyelenggara eGovernment yang ditingkatkan kapasitasnya.	1.100 Orang	579.840	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment.	Jawa Tengah	Jumlah penyelenggara eGovernment yang ditingkatkan kapasitasnya.	1.100 Orang	704.123	
URUSAN STATISTIK											
4.	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi.				3.423.550					3.923.550	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur.	Jawa Tengah	Jumlah data sektor ekonomi dan infrastruktur yang tersedia dalam Single Data Sistem.	8.000 Jenis	507.040	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur.	Jawa Tengah	Jumlah data sektor ekonomi dan infrastruktur yang tersedia dalam Single Data Sistem.	8.000 Jenis	507.040	
4.2	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Jawa Tengah	Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data Sistem.	9.000 Jenis	677.833	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Jawa Tengah	Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data Sistem.	9.000 Jenis	1.306.231	
4.3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah daftar informasi publik yang dipublikasikanBadan Publik.	70 Kelompok	470.602	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah daftar informasi publik yang dipublikasikanBadan Publik.	70 Kelompok	470.602	
4.4	Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Persentase penyelesaian sengketa informasi.	83%	2.518.075	Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Persentase penyelesaian sengketa informasi.	83%	2.518.075	
URUSAN PERSANDIAN											
5.	Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah.				8.831.904					6.253.592	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1	Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi.	Jawa Tengah	Jumlah aplikasi yang di- assesment keamanan informasinya.	149 Unit	2.785.750	Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi.	Jawa Tengah	Jumlah aplikasi yang di- assesment keamanan informasinya.	149 Unit	1.854.020	
5.2	Kegiatan Tata Kelola Persandian.	Jawa Tengah	Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya.	201 Orang	3.656.290	Kegiatan Tata Kelola Persandian.	Jawa Tengah	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pengelola persandian daerah.	201 Orang	1.644.400	
5.3	Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.	Jawa Tengah	Jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi.	21.442 Buah	2.389.864	Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.	Jawa Tengah	Jumlah pengelolaan komunikasi intra pemerintah.	21.442 Buah	2.755.172	
EKS BAU											
6.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.				9.368.432						13.041.991
6.1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terlaksananya manajemen keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	1 Dok	974.700	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terlaksananya manajemen keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	1 Dok	514.600	
6.2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan	Jawa Tengah	Terlayaninya jasa surat menyurat.	12 Bulan	31.191	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan	Jawa Tengah	Terlayaninya jasa surat menyurat.	12 Bulan	27.360	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kearsipan Perangkat Daerah.					Kearsipan Perangkat Daerah.					
6.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik.	12 Bulan	2.519.404	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik.	12 Bulan	2.519.404	
6.4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah.	Jawa Tengah	Tersedianya jaminan terhadap barang-barang milik daerah.	12 Bulan	162.450	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah.	Jawa Tengah	Tersedianya jaminan terhadap barang-barang milik daerah.	12 Bulan	162.450	
6.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor.	12 Bulan	2.008.011	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor.	12 Bulan	2.406.800	
6.6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah.	12 Bulan	779.760	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah.	12 Bulan	779.760	
6.7	Keagiatan Pelayanan Penyediaan Makan	Jawa Tengah	Jumlah makan dan minum yang memadai.	12 Bulan	228.000	Keagiatan Pelayanan Penyediaan Makan	Jawa Tengah	Jumlah makan dan minum yang memadai.	12 Bulan	228.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Minum Rapat Perangkat Daerah.					Minum Rapat Perangkat Daerah.					
6.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia.	12 Bulan	25.992	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia.	12 Bulan	25.992	
6.9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Gedung dan kendaraan dinas yang representatif.	12 Bulan	1.057.354	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Gedung dan kendaraan dinas yang representatif.	12 Bulan	2.160.140	
6.10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah yang memadai.	12 Bulan	292.410	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah yang memadai.	12 Bulan	302.064	
6.11	Kegiatan Penyediaan Sarana	Jawa Tengah	Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat	12 Bulan	494.739	Kegiatan Penyediaan Sarana	Jawa Tengah	Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio,	12 Bulan	2.812.827	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Prasarana Kantor.		pendingin, genset dan sarpras lainnya.			dan Prasarana Kantor.		komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya.			
6.12	Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal	Jawa Tengah	Jumlah SDM yang memadai.	12 Bulan	194.944	Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal	Jawa Tengah	Jumlah SDM yang memadai.	12 Bulan	479.800	
6.13	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran.	Jawa Tengah	Perlengkapan pendukung perkantoran yang memadai.	12 Bulan	599.477	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran.	Jawa Tengah	Perlengkapan pendukung perkantoran yang memadai.	12 Bulan	622.794	
7.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.				1.348.985					1.348.985	
7.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	7 Dok	1.024.085	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	7 Dok	1.024.085	
7.2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	5 Dok	324.900	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	5 Dok	324.900	
	J U M L A H (RANCANGAN AWAL RKPD 2020)				66.496.177	J U M L A H (ANALISIS KEBUTUHAN DISKOMINFO)				102.449.064	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Jawa Tengah yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO PROV. JATENG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

3.1.1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus pada membangun infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan koneksifitas *broadband* di seluruh wilayah Indonesia, mendorong transformasi digital pada sector ekonomi dan pemerintahan yang didukung oleh sumberdaya manusia digital, memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik, mempersiapkan masyarakat secara social dan budaya untuk memasuki dunia digital.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2019-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;

3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaranstrategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

3.1.2. Renstra BSSN RI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025 adalah : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu”, yang kemudian ditegaskan bahwa ”keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara.” Konsep mengenai “keamanan nasional” yang ditegaskan di dalam RPJPN tersebut sangat penting karena telah menyatukan aspek pertahanan dan keamanan.

Visi-Misi Presiden RI 2015-2019, selanjutnya diterjemahkan dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut dengan ‘NAWA CITA’, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Peran BSSN RI dalam rangka dukungan pada Prioritas ke-1, prioritas ke-8 dan prioritas ke-9

TUGAS DAN FUNGSI BSSN

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
3. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
4. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan BSSN; dan
8. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanansiber.

Visi dan MISI BSSN

Visi

Menjadi institusi terpercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi

1. Menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industry dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi
4. membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan system identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atauserangan siber dan sandi
5. membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warganegara Indonesia
6. menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Potensi BSSN

Pembentukan BSSN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kekuatan Negara menghadapi ancaman siber di Indonesia. Pembentukan BSSN berpotensi memperkuat kebijakan di bidang keamanan siber dan sandi seluruh stakeholder di bidang siber, serta menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan mengonsolidasikan masyarakat, akademisi, praktisi, dan komunitas siber di dalam dan luarnegeri.

Keberadaan BSSN diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan siber Indonesia dalam bentuk koordinasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan di bidangsiber di Indonesia, yang meliputi Kepolisian Republik Indonesia (cyber crime), TNI/Kementerian Pertahanan (cyber defense), Kementerian Luar Negeri(cyber diplomacy) dan

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tidak tertutup kemungkinan juga dengan lembaga-lembaga lainnya

Potensi BSSN dalam meningkatkan keamanan siber dan sandi sangat besar, mengingat BSSN dapat bekerjasama dengan lembaga keamanan siber di negara-negara maju lainnya. BSSN juga dapat melakukan benchmark to best practice pada lembaga lembaga keamanan siber di Negara lain yang lebih maju.

Pembentukan BSSN meningkatkan potensi pengembangan SDM yang profesional di bidang keamanan siber di Indonesia. Dalam konteks SDM siber, BSSN berpotensi membangun SDM siber yang professional dan adaptif terhadap teknologi (technology adaptive) baik untuk kebutuhan internal maupun nasional. Keberadaan BSSN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM siber yang menguasai teknologi informasi yang terus berkembang pesat di Indonesia.

Adapun dalam konteks kinerja, BSSN berpotensi membangun system manajemen kinerja yang member peluang dan penghargaan kepada inovasi-inovasi baru di bidang keamanan siber di Indonesia. BSSN dapat membangun budaya dan perilaku untuk meningkatkan produktifitas dan profesionalisme SDM dalam bidang keamanan siber dengan menginisiasi pemberian penghargaan di bidang keamanan siber untuk berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta bahkan untuk tingkat individu.

Pembentukan dan penguatan BSSN juga menciptakan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan agar BSSN dapat berperan secara maksimal, diantaranya dalam penyusunan Undang-Undang yang membantu penguatan kewenangan dan dukungan anggaran yang kuat bagi program-program pengamanan siber dan sandi di Indonesia

Tantangan BSSN RI

BSSN memiliki tantangan besar agar mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. BSSN berada di garis terdepan dalam mengembangkan kapabilitas unggul SDM siber dan sandi sehingga deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritical nasional (critical infrastructure), dan ekonomi digital (e-commerce).

BSSN di masa depan diharapkan dapat berperan besar dalam memberikan edukasi kepada publik/masyarakat di bidang keamanan siber, dapat mengambil peran penting dalam pengendalian informasi dan berita palsu (hoax) melalui literasi-literasi terkait, serta menjadi juru bicara representatif dalam menghadapi beberapa kejadian nasional di bidang keamanan siber dan menjadi wakil Indonesia di forum-forum siber internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan BSSN.

Selain melaksanakan tupoksi di bidang keamanan siber, BSSN juga tetap mengemban tupoksi di bidang penyelenggaraan persandian untuk pemerintah atau negara. Dalam konteks revitalisasi persandian, maka BSSN memiliki tantangan untuk tetap melakukan penyelenggaraan

persandian untuk pengamanan informasi di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat, maupun di daerah, melaksanakan kegiatan terkait analisis sinyal, modernisasi dan sertifikasi peralatan sandi, mengembangkan peralatan sandi karya mandiri, melaksanakan audit persandian secara sistematis dan terintegrasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian kriptografi serta terus melakukan pengembangan standar kriptografi nasional

Permasalahan BSSN RI

Berbagai permasalahan yang ada sehingga di butuhkan peran aktif dari BSSN RI adalah:

- 1) Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus malware /trojan-activity sebesar 92% dari total 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019).
- 2) Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi sebesar 56% (Jan 2019).
- 3) BSSN hanya memiliki satu sistem monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia.
- 4) Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
- 5) Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar stakeholder terkait.

Tujuan Renstra BSSN RI

1. Tercapainya fondasi struktur, system dan budaya organisasi BSSN yang kuat.
2. Tersusunnya kebijakan, system dan prosedur berstandar global dalam bidang keamanan siber dan sandi di Indonesia.
3. Tersedianya system manajemen talenta untuk menarik, memelihara dan meretensi SDM siber dan sandi terbaik.
4. Tercapainya kinerja pencegahan, deteksi, mitigasi, dan penanggulangan ancaman keamanan siber dan sandi.
5. Terselenggaranya kerjasama-kerjasama strategis dengan seluruh pihak untuk membangun keamanan siber dan sandi di Indonesia.
6. Terbentuknya kesadaran, perilaku dan budaya keamanan siber yang baik pada setiap warganegara Indonesia.

3.1.3. Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Dokumen renstra Badan Pusat Statistik tidak dapat menjadikan acuan bagi dokumen Renstra Pemerintah Daerah. Berdasarkan amanat pada lampiran UU 23/2014 yaitu pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota, pada huruf T pembagian urusan pemerintahan bidang statistik pemerintah pusat adalah penyelenggaraan statistik dasar sedangkan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah provinsi, sehingga antara pusat dan daerah untuk urusan pemerintahan bidang statistik tidak ada hubungan kerja secara langsung karena lingkup kerjanya yang berbeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Prov. Jateng.

Tujuan kinerja pembangunan yang akan dicapai oleh Diskominfo dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan selama Tahun 2018-2023 adalah Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah dengan 3 (tiga) sasaran utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
- 3) Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintahan Jawa Tengah.

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2018-2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2021.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah.		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Angka	3,10
		1) Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE.	Angka	3,41
			Indeks Domain Tata Kelola SPBE.	Angka	3,71
			Indeks Domain Layanan SPBE.	Angka	4,06
		2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral.	Persen	63,72

		3) Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintahan Jawa Tengah.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Angka	2+
--	--	---	--	-------	----

Sumber: Renstra Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2018-2023.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFO PROV. JATENG

Rumusan program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.

Rumusan Program dan Kegiatan Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIO- RITAS PEM- BA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIO- RITAS PEM- BA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	URUSAN KOMINFO											62.353.891		80.218.379		
1.1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	3,06 2,61 3,33	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	-	-	Meningkat- nya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	3,06 2,61 3,33	19.797.749	70 %	36.800.005		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK
1.1.1	Kegiatan Pengeloaan E- Government lingkup Pemerintah daerah Provinsi	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	-	-	Meningkat- nya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		9.777.749	70 %	24.702.005		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK
1.1.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah.	69 Lokasi	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	8.198.030	79 Lokasi	22.589.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Infrastruktur dan Teknologi

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIO- RITAS PEM- BA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIO- RITAS PEM- BA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
1.1.1. 2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan system penghubung layanan pemerintah	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah.	69 Lokasi	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	1.055.519	79 Lokasi	1.500.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Infrastruktur dan Teknologi
1.1.1. 3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	Jumlah SKPD Yang Terintegrasi Infra-struktur TIK.	28 OPD	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	325.000	35 OPD	363.005		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi
1.1.1. 4	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Tehnologi Informasi dan Komunikasi.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	Jumlah SKPD Yang Terintegrasi Infra-struktur TIK.	28 OPD	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	199.200	35 OPD	250.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi
1.1.2	Kegiatan Pengeloaaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi	60 %	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah		10.020.000	70 %	12.098.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah provinsi			Provinsi Jawa Tengah.		dan komunikasi.				Provinsi Jawa Tengah.						
1.1.2.1	Sub Kegiatan pendaftaran nama domain pemerintah provinsi.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	Jumlah Kapasitas Bandwidth yang tersedia.	1.600 MBps	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	15.750	1.800 MBps	18.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Internet dan Intranet
1.1.2.2	Sub Kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	Jumlah SKPD Yang Terintegrasi Infra-struktur TIK.	1.600 MBps	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	197.500	1.800 MBps	200.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Internet dan Intranet
1.1.1.5	Sub Kegiatan penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	Jumlah Kapasitas Bandwidth yang tersedia.	1.600 MBps	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	60 %	9.806.750	1.800 MBps	11.880.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Internet dan Intranet

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
1.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	3,06 2,61 3,33	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	65 %	-	-	Meningkat- nya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	3,06 2,61 3,33	7.310.899	75 %	12.638.259		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang eGov
1.2.1	Kegiatan Pengelolaan E- Government.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	3,06 2,61 3,33	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	65 %	-	-	Meningkat- nya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	3,06 2,61 3,33	7.310.899	75 %	12.638.259		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang eGov
1.2.1. 1.	Sub Kegiatan pengembangan aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	65 %	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikem- bangkan/di kelola.	13 Unit	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	65 %	5.404.572	14 Unit	9.232.568		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang eGov Seksi Pengembangan Aplikasi
1.2.1. 2.	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	65 %	Jumlah regulasi aplikasi yang terbit.	4 Dok	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	65 %	1.408.727	5 Dok	2.395.456		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang eGov Seksi Tata Kelola eGov

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
1.2.1. 3.	Sub Kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	65 %	Jumlah penyelenggara eGovernment yang ditingkatkan kapasitasnya.	1.100 Org	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	65 %	497.600	1.100 Org	1.010.235		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang eGov Seksi Pengembangan Ekosistem eGov
1.3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	3,06 2,61 3,33	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	3,06 2,61 3,33	35.245.243	78 %	31.500.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP
1.3.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		33.145.243	78 %	27.900.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP
1.3.1. 1.	Sub Kegiatan pengelolaan media komunikasi publik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan.	132 Konten	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	11.953.037	186 Konten	12.100.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik
1.3.1. 2.	Sub Kegiatan pengelolaan	-	-	Meningkatnya Teknologi		Nilai survey kepuasan	71 %	Jumlah konten	132 Konten	Nilai survey kepuasan	71 %	5.080.285	186 Konten	4.500.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	konten dan perencanaan media komunikasi publik.			Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		komunikasi publik.		informasi publik yang disebarluaskan.		komunikasi publik.						Bidang IKP Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik
1.3.1.3.	Sub Kegiatan Layanan hubungan media.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan.	132 Konten	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	3.209.625	186 Konten	3.500.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik
1.3.1.4.	Sub Kegiatan kemitraaan dengan pemangku kepentingan.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan.	132 Konten	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	3.890.910	186 Konten	1.300.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik
1.3.2.1.	Sub Kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan.	62 Kelompok	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	987.995	85 Kelompok	900.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Sumberdaya Kehumasan dan Komunikasi Publik

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
1.3.2. 2.	Sub Kegiatan penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan.	62 Kelom-pok	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	279.948	85 Kelom-pok	300.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Sumberdaya Kehumasan dan Komunikasi Publik
1.3.3. 1.	Sub Kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	Jumlah Rekomendasi analisis berita dan pendapat umum.	132 Buah	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	928.240	176 Buah	2.100.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Opini Publik
1.3.3. 2.	Sub Kegiatan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	Jumlah Rekomendasi analisis berita dan pendapat umum.	132 Buah	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	3.876.698	176 Buah	2.000.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Opini Publik
1.3.3. 3.	Sub Kegiatan manajemen komunikasi krisis.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	Jumlah Rekomendasi analisis berita dan pendapat umum.	132 Buah	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	71 %	2.938.505	176 Buah	1.200.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Opini Publik
1.3.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan	45,54 %	Persentase Badan Publik	84 %	-	-	Meningkatnya pemanfaatan	45,54 %	2.100.000	78 %	3.600.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Komunikasi Publik Daerah Provinsi.			informasi statistik sektoral.		yang terbuka.				data dan informasi statistik sektoral.						Bidang Statistik
1.3.2. 1.	Sub Kegiatan pelayanan informasi publik.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.		Persentase Badan Publik yang terbuka.	84 %	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasi kan Badan Publik.	70 Kelom- pok	Persentase Badan Publik yang terbuka.	84 %	350.000	75 Kelom- pok	700.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik
1.3.2. 1.	Sub Kegiatan penguatan tata kelola komis informasi di daerah.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.		Persentase Badan Publik yang terbuka.	84 %	Persentase penyelesai- an sengketa informasi.	83 %	Persentase Badan Publik yang terbuka.	84 %	1.750.000	84 %	2.900.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik
2	URUSAN STATISTIK											2.170.583		2.100.000		
2.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi	45,54 %	Persentase ketersediaan data sektoral.	89 %	-	-	Meningkat- nya pemanfaatan data dan informasi	45,54 %	2.170.583	95 %	2.100.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
				statistik sektoral.						statistik sektoral.						
2.1.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	45,54 %	Persentase ketersediaan data sektoral.	89 %	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	45,54 %	2.170.583	95 %	2.100.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik
2.1.1.1.	Sub Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	45,54 %	Persentase ketersediaan data sektoral.	89 %	Jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System.	8.000 Jenis	Persentase ketersediaan data sektoral.	89 %	270.583	8.500 Jenis	400.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur
2.1.1.2.	Sub Kegiatankoordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, desiminasi data statistic sektoral.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	45,54 %	Persentase ketersediaan data sektoral.	89 %	Jumlah data sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tersedia dalam Single Data System.	9.000 Jenis	Persentase ketersediaan data sektoral.	89 %	1.900.000	9.500 Jenis	1.700.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik Seksi Statistik Sosial Politik Hukum dan HAM
3	URUSAN PERSANDIAN											6.881.605		13.443.737		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
3.1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	2	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	2	6.881.605	66,67 %	13.443.737		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI
3.1.1	Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	2	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	2	4.697.092	66,67 %	10.035.500		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI
3.1.1.1.	Sub Kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan dan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	2	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya.	201 Org	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	824.928	201 Org	1.435.500		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI Seksi Tata Kelola Persandian
3.1.1.2.	Sub Kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam	2	Persentase PD memiliki Keamanan	50,00 %	Jumlah aplikasi yang di-assessment	149 Unit	Persentase PD memiliki Keamanan	50,00 %	1.112.800	198 Unit	3.500.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik.			mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.		Informasi >80.		Keamanan Informasinya.		Informasi >80.						Bidang Persandian dan KI Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi
3.1.1.3.	Sub Kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	1	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	Jumlah aplikasi yang di-assessment Keamanan Informasinya.	149 Unit	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	1.907.124	198 Unit	3.500.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi
3.1.1.4.	Sub Kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jarring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	2	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	Jumlah aplikasi yang di-assessment Keamanan Informasinya.	149 Unit	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	852.240	198 Unit	1.600.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NAN- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
3.1.2	Kegiatan penetapan pola hubungan komunitas sandi antar perangkat daerah provinsi.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	2	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	2	2.184.513	66,67 %	3.408.237		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI
3.1.2.1.	Sub Kegiatan operasional jarring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	2	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	Jumlah informasi yang menggunakan jarring komunikasi sandi.	21.442 Buah	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	50,00 %	2.184.513	27.297 Buah	3.408.237		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
4	EKS BAU											9.910.315		15.626.654		
4.1	Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	9.910.315	100 %	15.626.654		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
4.1.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan.	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	190.000	100 %	215.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat
4.1.1.1.	Sub Kegiatan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Terlaksana-nya manajemen keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	1 Dok	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	70.000	1 Dok	75.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Keuangan
4.1.1.3.	Sub Kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Terlaksana-nya manajemen keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	1 Dok	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	100.000	1 Dok	115.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Keuangan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
4.1.1. 4.	Sub Kegiatan penyusunan laporan keuangan bulanan /semesteran	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Terlaksana- nya manajemen keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	1 Dok	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	20.000	1 Dok	25.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Keuangan
4.1.2.	Kegiatan Administrasi Umum.	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	-	-	Meningkat- nya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	8.383.565	100 %	12.716.268		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat
4.1.2. 1.	Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Tersedia- nya jasa suratmenyu- rat.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	17.600	12 Bulan	20.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
4.1.2. 2.	Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Tersedia- nya jasa komuni- kasi, air, listrik.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	1.325.115	12 Bulan	2.500.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 3.	Sub Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Tersedia- nya jaminan terhadap barang milik daerah.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	140.900	12 Bulan	165.190		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 4,	Sub Kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Terseleng- garanya pelayanan perkan- toran, honorarium tenaga non- PNS dan kebersihan kantor.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	1.535.050	12 Bulan	2.642.200		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
4.1.2. 5.	Sub Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Terlaksana- nya manajemen keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	1 Dok	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	507.250	1 Dok	550.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Keuangan
4.1.2. 6.	Sub Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	600.000	12 Bulan	888.927		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Keuangan
4.1.2. 7.	Sub Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Jumlah makan dan minum yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	285.000	12 Bulan	259.920		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
4.1.2. 8.	Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Jumlah bahan bacaan yang tersedia.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	12.000	12 Bulan	29.631		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 9	Sub Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Gedung yang represen- tatif.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	2.198.400	12 Bulan	2.700.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 10	Sub Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Kendaraan dinas yang represen- tatif.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	499.200	12 Bulan	735.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
4.1.2. 11.	Sub Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Perengkap angedungk antor yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	15.000	12 Bulan	17.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 12.	Sub Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Peralatange dungkantor yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	149.200	12 Bulan	323.400		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 13.	Sub Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	100 %	Meubelairk antoryang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	100 %	15.000	12 Bulan	20.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIO- RITAS PEM- BA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIO- RITAS PEM- BA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
				Provinsi Jawa Tengah.		Perangkat Daerah.					Perangkat Daerah.					
4.1.2. 14.	Sub Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Ketersediaa nperlengka pangedung kantor yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	100.000	12 Bulan	300.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 15.	Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Penyediaan Sarana kantor yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	300.000	12 Bulan	575.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
4.1.2. 16.	Sub Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Penyediaanj asakebersih ankantor.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	291.250	12 Bulan	300.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 17.	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalansi listrik/penerang an bangunan kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Penyediaan nstalansilist rikyang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	35.000	12 Bulan	65.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 18.	Sub Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	100 %	Alattuliskan tor yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	100 %	149.200	12 Bulan	350.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
				Provinsi Jawa Tengah.		Perangkat Daerah.				Perangkat Daerah.						
4.1.2. 19.	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Barangceta kandanpen ggandaan yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	139.200	12 Bulan	150.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.2. 20.	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Bahan logistic yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	69.200	12 Bulan	125.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.3.	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	100 %	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	62,50 %	338.400	100 %	1.000.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
				Provinsi Jawa Tengah.		Perangkat Daerah.				Provinsi Jawa Tengah.						
4.1.3.1.	Sub Kegiatan pendidikan pelatihan formal	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	62,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Jumlah SDM yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	338.400	12 Bulan	1.000.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Program
4.1.3.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	65	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	65	998.350	100 %	1.720.386		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat
4.1.3.1.	Sub Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah.	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	65	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	7 Dok	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100.000	7 Dok	250.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Program

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOK ASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Provinsi Jawa Tengah.				Provinsi Jawa Tengah.						
4.1.3. 2.	Sub Kegiatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan.	-	-	Meningkatnya Akuntabilitasnya Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	65	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	Jumlah dokumen perencana- an Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	7 Dok	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	499.200	7 Dok	1.000.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Program

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
4.1.3. 3.	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah.	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	65	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	Jumlah dokumen perencanaan dan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	7 Dok	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	150.000	7 Dok	350.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Program
4.1.3. 4.	Sub Kegiatan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah.	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	65	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	5 Dok	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	149.150	5 Dok	470.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Program
4.1.3. 5.	Sub Kegiatan evaluasi kinerja	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas	65	Persentase Tersusunnya	100 %	Jumlah dokumen	5 Dok	Persentase Tersusunnya	100 %	100.000	5 Dok	170.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGE T		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE T	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	perangkat daerah.			Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.		Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.		evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.		Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.						Sekretariat Subbag Program
TOTAL BELANJA LANGSUNG												103.477.889		110.041.870		